

ABSTRAK

Ketentuan nafkah dalam Islam terdapat pengecualian apabila istri mempunyai perilaku *nusyuz*, salah satunya nafkah *mut'ah* yang di terima istri apabila perceraian atas kehendak suami menjadi gugur akibat *nusyuz*. Putusan Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Gorontalo memutuskan untuk menggugurkan hak nafkah *mut'ah* pada istri yang diceraikan karena *nusyuz*, akan tetapi Putusan Pengadilan Agama Tuban mengabulkan nafkah *mut'ah* pada istri yang dinyatakan *nusyuz*. Hal ini terkesan kontradiktif antara hukum Islam dan putusan hakim. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *mut'ah* kepada istri yang dinyatakan *nusyuz* pada putusan nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn, dan untuk menjelaskan tinjauan *maqāshid asy-syarī'ah* terhadap putusan hakim dalam menetapkan nafkah *mut'ah* pada istri yang *nusyuz*. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis data sekunder yang melingkupi bahan hukum primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn, dan Kompilasi Hukum Islam, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, pendapat ahli hukum, bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa hukum, kamus kalimatul arab, ensiklopedia, serta media internet lainnya. Pengumpulan data dengan melalui bahan pustaka, memahami makna, struktur, konteks pada teori dan kaidah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim untuk menetapkan nafkah *mut'ah* pada istri yang dinyatakan *nusyuz* mengandung nilai-nilai *maqāshid asy-syarī'ah*. Karena hakim menimbang kembali kaidah-kaidah terkait hak nafkah *mut'ah* yang diperoleh istri yang di talak, dan hakim mempertimbangkan adanya dampak buruk yang muasalnya dibenci Allah SWT. Hal ini sejalan dengan syariat Islam atas perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu menggauli istri atas prinsip Mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan (*imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan*). Putusan hakim sejalan dengan prinsip *syarī'ah* Imam Asy-Syatibi “*sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dengan tiga tingkatan maqāshid asy-syarī'ah yaitu dharūriyyât, hâjiyyat, dan Tahsîniyyât.*”

Kata Kunci: Imam Asy-Syatibi, *Maqāshid asy-syarī'ah*, Nafkah *Mut'ah*, *Nusyuz*

ABSTRACT

The provision of maintenance in Islam has exceptions if the wife has nusyuz behavior, one of which is the mut'ah maintenance received by the wife if the divorce is at the will of the husband becomes void due to nusyuz. The decisions of the Ambon Religious Court and the Gorontalo Religious Court decided to cancel the right to nafkah mut'ah for wives who were divorced because of nusyuz, but the Tuban Religious Court Decision granted nafkah mut'ah to wives who were declared nusyuz. This seems contradictory between Islamic law and the judge's decision. The purpose of this study is to find out the judge's consideration in determining mut'ah maintenance to a wife who is declared nusyuz in decision number 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn, and to explain the maqāshid ash-sharī'ah review of the judge's decision in determining mut'ah maintenance to a nusyuz wife. The type of research in this thesis is library research. The type of secondary data that covers primary legal materials, namely the Tuban Religious Court Decision Number 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn, and the Compilation of Islamic Law, secondary legal materials namely books, scientific works, legal journals, legal expert opinions, tertiary legal materials namely the Big Indonesian Dictionary (KBBI), legal language dictionary, Arabic sentence dictionary, encyclopedia, and other internet media. Data collection through library materials, understanding the meaning, structure, context of theories and rules. The results of the study show that the judge's decision to determine mut'ah maintenance for wives who are declared nusyuz contains maqāshid ash-sharī'ah values. Because the judge reconsiders the rules related to the right to mut'ah maintenance obtained by a divorced wife, and the judge considers the adverse effects whose origin is hated by Allah SWT. This is in line with Islamic law on the command of Allah SWT to husbands to always have sex with their wives on the principle of maintaining marital ties with goodness or releasing with virtue (imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan). The judge's decision is in line with the principle of Imam Ash-Syatibi's shari'ah "the shari'ah aims to realize the benefit of mankind in this world and in the hereafter, with three levels of maqāshid ash-sharī'ah namely dharûriyyât, hâjiyyat, and Tahsîniyyât."

Keywords: *Imam Asy-Syatibi, Maqāshid asy-syarī'ah, Nafkah Mut'ah, Nusyuz*

